

DINAMIKA SOSIAL KEDUDUKAN PEREMPUAN DI ARAB SAUDI ERA RAJA SALMAN

Nurul Fajar, Rasyidah
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
nurfa777@gmail.com; rasyidah@ar-raniry.ac.id

Abstract

This paper discusses the social dynamics of the position of women in Saudi Arabia during the reign of King Salman. In Islam, the concept of brotherhood towards all humans is the same regardless of gender, because in Islam women also have a major role in various aspects of society. Saudi Arabia is one of the Islamic countries that has so far distinguished the rights and positions between men and women. This paper argues that there was a very significant cultural change in Saudi Arabia in the era of King Salman, one of which was related to the position of women in Saudi Arabia. This change occurred due to the rapid development of communication and information technology which made globalization flow in Saudi Arabia. Therefore, there have been many cultural changes, especially regarding the position of women, which Saudi Arabian women have long dreamed of. Cultural changes or modernization in Saudi Arabia are reasonable to do to maintain the Saudi Arabian economy from the threat of a financial deficit.

Keywords: Islam, Saudi Arabian Women, King Salman

Pendahuluan

Sampai abad ini, kesetaraan gender masih terus diperjuangkan oleh banyak perempuan di seluruh dunia, terutama di negara Saudi Arabia yang masih menempati posisi terendah dalam hak dan kedudukan perempuan. Adat dan budaya di negara Arab sangat bereperan penting dalam konstruksi kedudukan perempuan, dimana laki-laki menjadi central kehidupan. Arab Saudi merupakan sebuah negara konservatif antara perpaduan sosial dan agama. Beberapa kepercayaan adat Arab Saudi yang melarang perempuan untuk mengendarai kendaraan ataupun menjadi bagian dari praktisi hukum dan insinyur bukanlah berasal dari hukum Islam, melainkan muncul dari stigma masyarakat dalam melestarikan budaya.¹

Salman bin Abdulaziz Al Saud adalah Raja Arab Saudi yang ketujuh yang merupakan anak ke 25 (dua puluh lima) dari Ibnu Saud dan menjadi Raja untuk menggantikan kakaknya, Raja Abdullah yang meninggal pada 25 Januari 2015. Salman menjadi Raja Arab Saudi ketika usianya menginjak 79 tahun. Salman yang sebelumnya telah banyak mengurus urusan kerajaan juga memiliki pandangan konservatif dan tradisional, sama dengan saudaranya. Pandangan ini turut berimplikasi pada kebijakan terhadap perempuan, khususnya peran publik perempuan.

Dahulu perempuan di negara Arab Saudi memiliki posisi yg paling rendah dibanding perempuan lain di dunia. Hak-haknya juga rentan terabaikan. Dalam konteks pendidikan, Arab Saudi menggunakan kurikulum berbasis agama yang dalam pemilihan program studi dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan inilah yang mengakibatkan program studi yang dipilih terkadang tidak sesuai dengan minat bakat sehingga muncul rasa ketidakadilan bagi perempuan dan juga laki-laki. Dalam konteks sosial, ruang gerak perempuan dibatasi dengan adanya larangan perempuan berpergian sendiri dan pelarangan mengemudikan mobil. Pembatasan ruang sosial ini menimbulkan resistensi dari kelompok perempuan di Arab. Gerakan penolakan dan advokasi menguat. Akan tetapi upaya resistensi juga tinggi yang dilandaskan pada ajaran Islam yang disebutkan membatasi ruang sosial perempuan.

Sementara dalam perspektif Islam, terdapat beberapa ayat al-Qur'an menekankan

¹ A Hamdan, 2005, Women and Education in Saudi Arabia: Challenges and Achievement, (International and Education Journal, 6(1), hal. 42-64

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. QS.al-Nisa (4):124 menyebutkan: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.² Ayat ini menegaskan tentang kesetaraan balasan bagi perempuan dan laki yang beramal saleh. Hal senada juga ditegaskan dalam beberapa ayat lainnya, diantaranya QS. al-Nahl (16): 97 yang menyebutkan: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” Quraish Shihab menyebutkan ayat ini sebagai penilaian kesalehan amal yang tidak membedakan jenis kelamin.³

Ketegasan lebih general tentang derajat manusia disebutkan dalam QS. al-Hujurat (49): 13:

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenalmengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴

Menurut salah seorang feminis muslim Indonesia Musda Mulia,⁵ ayat di atas menjelaskan tentang ajaran Islam yang membebaskan manusia dari ketidakadilan gender. Suku dan bangsa yang berbeda, jenis kelamin laki-laki dan perempuan bukan penentu kemuliaan seseorang, karena kemuliaan di sisi Allah ditentukan oleh kadar ketaqwaan yang ditunjukkannya apapun bangsa atau jenis kelaminnya.

Namun demikian, meskipun beberapa ayat al-Qur'an menjelaskan tentang kesetaraan gender, namun penafsiran yang membatasi ruang sosial perempuan juga banyak. Termasuk yang dipahami di Arab Saudi sehingga muncul beberapa kebijakan pembatasan ruang gerak perempuan. Kebijakan yang telah lama menjadi agenda advokasi perempuan di sana. Akhirnya, setelah berjuang puluhan tahun, gerakan perempuan ini mendapatkan jawaban

² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS.al-Nisa (4):124

³ Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan dan Keresarian Al-Qur'an vol. V (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 342.

⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. al-Hujurat (49): 13:

⁵ Siti Musda Mulia (ed), Keadilan dan Kesejahteraan Gender (Cet. II; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003), h. 75.

yang diharapkan. Larangan terhadap perempuan mulai dicabut seperti mengendarai kendaraan, pendidikan, pekerjaan, politik serta larangan-larangan lainnya yang selama ini dibatasi ruang geraknya. Perubahan ini sangat terkait dengan dibentuknya “visi 2030” yang dikembangkan oleh pemerintah Arab Saudi guna memodernisasikan kawasan tersebut untuk menyelamatkan perekonomian Arab Saudi. Agenda visi 2030 salah satunya memberikan ruang gerak atau peran perempuan untuk mengembangkan bakatnya dan bagaimana perempuan dapat mengaktualisasikan kemampuan yang dimiliki.⁶

Perubahan kebijakan yang mendasar, dan berimplikasi pada dinamika sosial kedudukan perempuan menjadi hal yang unik, menarik dan penting untuk di kaji. Karenanya, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana perjuangan perempuan di negara Arab Saudi dalam memperjuangkan haknya serta bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi di era Raja Salman yang dinilai banyaknya terjadi perubahan dari era sebelumnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengupas lebih dalam tentang “Dinamika Sosial Kedudukan Perempuan Di Arab Saudi Era Raja Salman.”

Adat dan Budaya Arab Saudi

Arab Saudi merupakan sebuah negara konservatif antara perpaduan sosial dan agama, hal ini terlihat pada budaya homogen masyarakat yang terdiri atas kesukuan dan hubungan agama yang erat dan menjadikan kawasan ini unik dengan beragam budayanya yang komplis, sehingga untuk membedakan antara prinsip Islam dengan adat atau budaya Arab sangat sulit. Beberapa kepercayaan budaya Arab Saudi yang melarang perempuan mengendarai kendaraan lalu menjadi bagian dari substansi hukum, bukanlah berasal dari hukum Islam, melainkan muncul dari upaya masyarakat dalam melestarikan budaya.⁷

Sebagian besar masyarakat Arab Saudi meyakini bahwa tugas utama seseorang perempuan adalah berada di rumah. Karenanya Arab Saudi memiliki undang-undang yang mengatur bahwa perempuan harus mendapatkan izin dari wali laki-laki mereka dalam melakukan aktivitas di kehidupannya sehari-hari. Pada kehidupan berkeluarga atau rumah tangga, laki-laki dan perempuan mempunyai tingkatan yang berbeda, laki-laki bertugas

⁶ Vision 2030, hal 37

⁷ A Hamdan, 2005, *Women and Education in Saudi Arabia: Challenges and Achievement*, (International and Education Journal, 6(1), hal.42-64

buat mencari nafkah buat keluarga sedangkan perempuan hanya diperbolehkan di rumah saja untuk mengurus rumah tangga. Di Arab Saudi laki-laki juga harus mampu mengatur dan mengendalikan kebebasan istrinya. Kebebasan itu sendiri pada bentuk cara berpakaian, hingga dengan tingkah laku istrinya.⁸

Sesuai konteks sosial dan budaya Arab Saudi, perempuan yang sudah berkeluarga dikatakan berhasil apabila bisa mengurus rumah tangga. Akan tetapi, jika perempuan juga ikut bekerja mencari nafkah dan mengejar karirnya, dikhawatirkan hal ini akan mendorong perempuan akan mengambil alih semua tugas laki-laki, dan berujung pada persaingan pada berbagai bidang. Hal tersebut akan mengganti ciri-ciri normatif perempuan Arab pada umumnya. Dalam Forum Ekonomi Dunia 2014 yang membahas tentang ketidakseimbangan gender menunjukkan bahwa sebagian besar negara dengan mayoritas muslim mempunyai ketidakseimbangan terbesar dalam hal memajukan perempuan pada bidang kesehatan, pendidikan, politik dan ekonomi.⁹

Kondisi ini kerap pula menjadi stereotipe bagi masyarakat muslim yang dianggap diskriminatif bagi perempuan. Padahal Arab Saudi pada masa Rasulullah telah mengalami pencerahan yang luar biasa dengan masuknya Islam sebagai falsafah kehidupannya. Perempuan yang dulunya rentan terbunuh sejak kelahirannya, menjadi dihargai dengan rasa syukur melalui syariat Aqiqah dan penamaan yang baik. Lalu perempuan sebelum Islam yang tidak memiliki kewenangan pengelolaan harta, juga warisan bahkan diwariskan, berubah menjadi perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi juga berhak menerima warisan. Hak memilih pasangan yang terpasung sebelumnya, menjadi lebih leluasa sejak Islam datang. Karenanya banyak perempuan yang berkiprah dan berperan dalam sosial kehidupan masyarakat sejak lama.

Dinamika Sosial Kedudukan Perempuan Arab Saudi

Pada bulan Februari tahun 2009 Raja Abdullah menunjuk seseorang perempuan untuk diangkat menjadi Wakil Menteri Pendidikan yang menjadi awal mula perubahan Arab Saudi menjadi negara yang memberikan hak yang sama terhadap perempuan. Pengangkatan perempuan sebagai pejabat pemerintahan secara tidak eksklusif

⁸ Lilolia, 2019

⁹ Anwar, 2015

mendefinisikan ulang kiprah kesetaraan gender yang terbentuk dalam masyarakat Arab Saudi yang sangat patriarki. Selanjutnya pada tahun 2013 keterbukaan hak politik bagi perempuan mulai terbuka dengan diangkatnya 30 (tiga puluh) orang perempuan untuk duduk di Majelis Permusyawaratan Arab Saudi (Dewan Syura) yang sebagian besar berasal asal akademisi dan aktivis.¹⁰

Sejak tahun 2011 sudah mulai ada gerakan dari para aktivis perempuan dan puncaknya terjadi tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, perempuan Arab Saudi melakukan kegiatan kampanye untuk menuntut pemenuhan hak-hak sipil yang kemudian diwujudkan dalam hak partisipasi politik di pemilu 2015 serta penghapusan larangan perempuan mengemudi tahun 2017. Pada tahun 2015 Raja Salman naik tahta menggantikan Raja Abdullah dan selanjutnya menentukan Mohammad bin Salman menjadi putra mahkota. Pada periode ini mulai banyak perubahan yang terjadi, salah satunya saat mulai menjabat sebagai putra mahkota, Mohammad bin Salman melakukan reformasi kebijakan Visi 2030 Saudi Arabia untuk meningkatkan perekonomian Arab Saudi. Kebijakan ini diterapkan dengan cara membuka kesempatan yang sama pada pekerja laki-laki dan perempuan.¹¹

Kebijakan tentang kedudukan perempuan kemudian bermunculan setelah program Visi Saudi 2030 yang dicanangkan oleh Mohammad bin Salman. Kebijakan Arab Saudi tentang membatasi perempuan mulai dicabut, kebijakan pertama yang dicabut adalah larangan perempuan mengendarai kendaraan. Pada Juni 2018, pemerintah Arab Saudi mulai mengizinkan perempuan Arab Saudi untuk mengendarai kendaraan. Sebelumnya Arab Saudi sudah mengizinkan perempuan menonton pertandingan sepakbola secara pribadi di stadion. Kebijakan ini telah dicanangkan sebelumnya pada tahun 2017 melalui Royal decree no. M/85 tahun 2017.¹²

Perempuan diizinkan masuk stadion dibarengi dengan peningkatan fasilitas pada stadion yang awalnya hanya disediakan toilet untuk laki-laki saja, sekarang sudah tersedia toilet untuk perempuan juga. Sebagai fasilitas perempuan untuk menonton pertandingan sepakbola secara pribadi di stadion, pemerintah Arab Saudi juga menyiapkan “bagian

¹⁰ Beritasatu.com, 2013

¹¹ CNN Indonesia, 2018

¹² Kompas, 2019

keluarga” di stadion yang diperuntukkan kepada perempuan.¹³

Selanjutnya kebijakan tentang kedudukan perempuan yang diterapkan Arab Saudi adalah memperbolehkan perempuan untuk pergi ke luar negeri tanpa wali. Hal ini bisa terwujud dikarenakan pemerintah Arab Saudi mengganti sistem perwalian yang sudah berlaku lama di Arab Saudi. Reformasi ini mengubah sistem perwalian terbatas yang mengekang kaum perempuan Arab Saudi memperoleh hak atas diri mereka sendiri. Selain bebas berpergian, perempuan Arab Saudi juga secara resmi memperoleh hak untuk mendaftarkan kelahiran, pernikahan atau perceraian serta diakui menjadi wali bagi anak-anak di bawah umur.

Reformasi sistem perwalian di Arab Saudi menjadi lompatan besar untuk perubahan Arab Saudi yang awalnya sangat konservatif sebagai ketidaksetaraan gender. Reformasi sistem perwalian ini membuat perempuan dapat beranjak secara otonom untuk menggapai sesuatu yang sulit dilakukan oleh perempuan Arab Saudi sebelumnya sebab sistem perwalian ini sangat membatasi gerak perempuan di sana. Dengan menggunakan reformasi sistem perubahan ini, perempuan Arab Saudi dapat dengan mudah untuk menggapai impiannya. Dengan adanya izin perempuan pergi ke luar negeri tanpa wali, membuat perempuan bebas studi ke luar negeri atau bahkan bekerja di luar negeri. Hal ini sebelumnya tidak mungkin buat dilakukan karena sistem perwalian yang telah lama membentuk perempuan tidak bisa bebas pergi jika wali mereka tidak mengizinkan.

Semua kebijakan yang merubah dinamika sosial perempuan di Arab, diatur pada Visi Saudi 2030 yang dicanangkan oleh Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammad bin Salman. Secara garis besar, visi ini bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi Arab Saudi akibat harga minyak dunia yang semakin merosot serta melakukan diversifikasi ekonomi buat memperkuat kegiatan ekonomi dan investasi di Arab Saudi, menaikkan perdagangan di sektor selain minyak. Selain pada sektor ekonomi, Visi Saudi 2030 terapat juga agenda “kembali ke Islam Moderat” yang manamenitikberatkan untuk mengikis citra konservatif yang selama ini menjadi citra Arab Saudi.

Revolusi sosial ini telah meningkatkan partisipasi perempuan, terutama pada partisipasi pekerja perempuan di Arab Saudi yang awalnya 22% menjadi 30%.¹⁴ Beberapa

¹³ Kompas, 2017

¹⁴ Republika, 2019

pembaruan yang terkandung dalam Visi Saudi 2030 yang digagas oleh Mohammad bin Salman antara lain yaitu:¹⁵

1. Adanya usaha reformasi terhadap kebijakan tradisional serta pengaruh nilai patriarki yang kental dalam masyarakat Arab Saudi.
2. Mengubah pola kepemimpinan raja-raja sebelumnya yang fokus pada investasi politik serta mengurangi masalah sumber minyak.
3. Berkonsentrasi pada kebijakan menteri ekonomi.

Revolusi sosial dalam Visi Saudi 2030 terinspirasi dari kondisi Arab Saudi pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1970 dimana pada waktu itu efek dari globalisasi masuk ke Arab Saudi sehingga memunculkan liberalisasi di Arab Saudi. Arab Saudi ingin menghapus stigma ultrakonservatif mereka di dunia internasional dengan revolusi sosial yang menitikberatkan pada pengembalian hak-hak perempuan yang dibatasi. Arab Saudi ingin dunia memandang mereka menjadi negara Islam moderat yang terbuka secara global. Dengan adanya perubahan secara luas terutama terkait kedudukan perempuan, Arab Saudi berharap masuknya investasi luar ke Arab Saudi dan Arab Saudi juga bisa dengan bebas berinvestasi di banyak negara tanpa terstigma menjadi negara yang ultrakonservatif. Maka Arab Saudi berusaha melonggarkan sistem patriarki pada kehidupan bernegara maupun dalam kehidupan sehari-hari. Penghapusan pembatasan terhadap perempuan ini dievaluasi memunculkan rasa nyaman pada perempuan Arab Saudi, meskipun memang masih ada penolakan-penolakan yang berasal dari kaum patriarki.

Hardiyanti, dkk menyebutkan kebijakan visi Saudi 2030 sebagai tindakan strategis sebagai upaya reformasi untuk mengubah perekonomian negara.¹⁶ Pada saat yang sama kajian menunjukkan terbatasnya sebagian resources yang dimiliki Saudi, karena warga negara yang perempuan memiliki keterbatasan ruang gerak. Sehingga menjadi kebutuhan penting untuk dapat memaksimalkan peran perempuan. Pendidikan perempuan, izin berkendara, berpergian tanpa muhram, serta akses pada bidang pekerjaan yang lebih luas menjadi entri point yang diperhatikan dalam rangka meningkatkan peran perempuan pasca

¹⁵ Rosida, A. (2018)

¹⁶ Mega Hardiyanti, Sri Yuniati (2021)

terbitnya kebijakan Vision Saudi 2020. Periode panjang yang merumahkan perempuan Saudi telah berimplikasi pada tertinggalnya kemajuan sumber daya Saudi yang perempuan dibanding dengan laki-lakinya. Hal ini menegaskan tentang adanya masalah ketimpangan gender sebagai akibat pembangunan yang tidak adil gender.

World Summit for Social Development di Copenhagen yang dilaksanakan pada tahun 1995 telah menegaskan bahwa kesetaraan gender merupakan strategi yang penting dalam pembangunan sosial ekonomi dan perlindungan lingkungan.¹⁷ Berdasarkan kajian yang mendalam, World Bank juga telah menegaskan bahwa kesetaraan gender adalah persoalan mendasar dalam pembangunan. Hal ini sangat terkait dengan kemampuan negara untuk mengembangkan diri, mengatasi kemiskinan dan menjalankan pemerintahan yang efektif. Maka negara yang ingin maju, sudah seharusnya memperhatikan masalah yang terkait dengan kesetaraan gender.¹⁸ Beberapa kajian tentang peran perempuan dalam perspektif *gender and development* pada prinsipnya telah menjadi pengetahuan masyarakat dunia. Sehingga kebijakan Vision Saudi 2020, dapat juga disebutkan sebagai respon terhadap suara global.

Desakan dan aksi gerakan perempuan Arab Saudi, menjadi pemicu penting yang menghubungkan antara pengetahuan masyarakat dunia, dengan situasi dan kebutuhan internal negara ini. Melalui media teknologi informasi resistensi dan penolakan perempuan Saudi tersampaikan dan tersebar secara cepat. Dukungan internasional juga terdulang dan kembali dalam bentuk respon beragam untuk mendukung percepatan kebijakan Arab Saudi untuk mengkontekstualisasikan berbagai pembatasan.

Meski ada banyak kekhawatiran tentang dinamika sosial kedudukan perempuan yang berubah cepat, namun membatasinya juga bukan pilihan yang bijak. Karena jendela dunia yang tidak pernah terkunci, akan mengalirkan secara deras perubahan sosial kedudukan perempuan yang ada di seluruh dunia, ke setiap daerah dan negara. Layaknya sebuah perkampungan besar maka berbagai perubahan dibelahan bumi manapun akan cepat mengalir ke berbagai wilayah termasuk Arab Saudi. Maka cara terbijak adalah bukan membatasi atau mengekangnya, akan tetapi mengarahkan alirannya dalam koridor yang relevan dengan kearifan lokal yang terbuka.

¹⁷ Jurnal Perempuan, 2011

¹⁸ World Bank, 2001

Penutup

Ruang gerak perempuan di Arab Saudi sejak lama telah sangat dibatasi, mulai dari konteks pendidikan, sosial, dan politik. Perempuan Arab Saudi tidak memiliki hak yg sama dengan laki-laki, dan tak jarang perempuan Arab mengalami diskriminasi. Pembatasan ini dikukuhkan dengan beberapa aturan. Di antara aturan adalah adanya larangan tentang perempuan yang mengendarai kendaraan dan larangan perempuan berpergian sendiri tanpa izin dari wali.

Perubahan budaya Arab terkait dinamika sosial perempuan Saudi yang berlangsung cepat, terjadi pada era Raja Salman bin Abdul Aziz yang selanjutnya menentukan Mohammad bin Salman menjadi putra mahkota. Perubahan pertama kali mulai terjadi saat Mohammad bin Salman mencanangkan reformasi kebijakan Visi 2030 Saudi Arabia untuk meningkatkan perekonomian Arab Saudi. Kebijakan ini diterapkan dengan cara membuka kesempatan yang sama pada pekerja laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Arab Saudi mulai membentuk kebijakan ihwal tentang kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan, yang ditandai dengan adanya kebijakan perizinan terhadap perempuan untuk mengemudi serta adanya seorang perempuan di Arab Saudi yang diangkat sebagai pejabat pemerintahan. Perubahan lainnya terjadi akibat pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang membuat arus globalisasi menembus dinding kerjaan Arab Saudi. Perubahan kebijakan ini telah menyebabkan perubahan yang sangat signifikan terhadap hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini tentang kedudukan sosial perempuan di Arab Saudi. Dinamika sosial perempuan meningkat dengan meningkatnya akses peningkatan kapasitas dan kemandiriannya. Sesungguhnya juga Islam telah menunjukkan konsep persaudaraan dan persamaan terhadap semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin.

Endnote

- Beritasatu.com. (2013, February 20). Dilantik, 30 Wanita Anggota Dewan Syura. Beritasatu.com. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/asia/97974-dilantik-30-wanita-anggotadewan-syura-arab-saudi.html>
- CNNIndonesia. (2018, January 12). Kini, Wanita Saudi Boleh Menonton Sepak Bola di Stadion. Cnnindonesia.com. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180112172729-120-268481/kiniwanita-saudi-boleh-menonton-sepak-bola-di-stadion>
- Faktualnews. (2020). Perempuan Arab Saudi dari Waktu ke Waktu. Faktualnews.com. Retrieved from <https://faktualnews.co/2020/01/04/perempuan-arab-saudi-dari-waktu-kewaktu/185610/>
- Febriani, A., Fikri, A.I., Dewi, N. R. (2020). Dinamika Kesetaraan Gender di Arab Saudi: Sebuah Harapan Baru di Era Raja Salman. *Jurnal*, 6 (1)
- Jurnal Perempuan*. (2011, May 25). Millennium Development Goals dan Gender Mainstreaming. Dipetik December 13, 2012, dari *Jurnal Perempuan*: [jurnalperempuan.com /2011/05/millennium-developmentgoals-dan-gender-mainstreaming/](http://jurnalperempuan.com/2011/05/millennium-developmentgoals-dan-gender-mainstreaming/)
- Kompas. (2017, September 27). Akhirnya Arab Saudi Cabut Larangan Mengemudi bagi Perempuan. Kompas.com. Retrieved from <https://internasional.kompas.com/read/2017/09/27/14051701/akhirnya-arab-saudicabut-larangan-mengemudi-bagi-perempuan>
- Kompas. (2019, October 7). “Putra Mahkota MBS, Sosok Kunci Dalam Reformasi Arab Saudi.” Kompas.com. Retrieved from <https://internasional.kompas.com/read/2019/10/07/16163441/putra-mahkota-mbssosok-kunci-dalam-reformasi-arab-saudi?page=all>
- Lilolia, A. (2019). Perempuan Arab Saudi sedang berjuang untuk kebebasan - dan kesuksesan mereka terus bertambah. Retrieved from <https://theconversation.com/perempuan-arab-saudi-sedang-berjuang-untuk-kebebasan-dan-kesuksesan-mereka-terus-bertambah-122269>
- Mega Hardiyanti, Sri Yuniati (2021), Penjaminan Hak-Hak Perempuan dalam Visi Saudi Arabia 2030 (Guarantee Of Women's Rights In Vision Saudi Arabia 2030), *Journal of Feminism and Gender Studies* Volume (1) Nomor: 1 Januari – Juni 2021

- Nuryatno, A. (2001). *Islam, Teologi Pembebasan Dan Kesetaraan Gender (Studi Atas Pemikiran Ashgar Ali Engineer)* (M. Shobirin, Ed.). Yogyakarta: UII Press.
- Quraish Shihab, (2006), *Tafsir al-Mishbah; Pesan dan Kesorasian Al-Qur'an vol. V Cet. V*; Jakarta: Lentera Hati
- Hamdan, A.2005, *Women and Education in Saudi Arabia: Challenges and Achievement*, (*International and Education Journal*, 6 91)).
- Republika. (2013, November 23). *Kenapa Muslimah Arab Saudi Dilarang Menyetir?* Republika.co.id. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/duniaislam/fatwa/13/11/23/mwplcw-kenapa-muslimah-arab-saudi-dilarang-menyetir>
- Republika. (2019, March 19). “Wajah Saudi Era 60-an, Masa Keterbukaan Untuk Perempuan.” Republika.com. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/duniaislam/dunia/polnpj320/wajah-saudi-era-60an-masa-keterbukaan-untuk-perempuan>.
- Rosida, A. (2018). *Wacana Modernisasi Dalam Tantangan Peradaban, Peran Perempuan Sebagai Tonggak Sejarah Arab Saudi*. *Jurnal Palita*, 3(1).
- Siti Musda Mulia (ed), (2003) *Keadilan dan Kesejahteraan Gender (Cet. II)*; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender
- World Bank. (2001), *Engineering Development: Through Gender Equity in Rights, Resources, and Voice*, sebagaimana dikutip oleh Ratih Probosiwi, *Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Natapraja, *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Volume 3, Nomor 1, 2015